



Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Bengkalis

Herniyati ¹⁾, Hasim As'ari ²⁾, Adianto ³⁾

Universitas Riau
Jl. Binawidya, Pekanbaru, Indonesia

Herniyati7818@grad.unri.ac.id ¹⁾
hasimasari@lecturer.unri.ac.id ²⁾
adianto@lecturer.unri.ac.id ³⁾

Abstrak

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin ditengah-tengah masyarakat telah menjadi salah satu opsi kebijakan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan) dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, hasil penelitian ini adalah Implementasi program KUBE yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada kelompok usaha bersama.

Kata kunci: Implementasi Program, Pemberdayaan, Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama

Abstract

The development of social welfare is the responsibility of the government and society. The existence of a Joint Business Group (KUBE) for the poor in the community has become one of the policy options to increase productive economic enterprises (especially in increasing income) and the establishment of microfinance institutions. The purpose of this study is to analyze the implementation of the empowerment program for the poor through the Joint Business Group (KUBE) in Bengkalis District and identify the factors that hinder it. This research is a descriptive qualitative research type. The result of this research is that the implementation of the KUBE program carried out in Bengkalis District has not yet achieved optimal results but the implementation of the program is quite effective and successful according to the target for channeling funds to joint business groups.

Key words: Program Implementation, Empowerment, Poor, Joint Business Group

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat saat ini sudah dirasakan sangat mendesak. Komitmen Pembangunan Kesejahteraan fakir miskin penerima bantuan UEP. KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan strategi penguatan kelompok, pemberian bantuan stimulan usaha dan pendampingan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Direktorat Penanggulangan Pedesaan, serta diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan peserta PKH yang masih dalam transisi (status KSM-Keluarga Sangat Miskin).

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin ditengah-tengah masyarakat telah menjadi salah satu opsi kebijakan untuk meningkatkan usaha



ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan) dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Prinsip pelaksanaan KUBE adalah: (1) Memperkuat organisasi/lembaga tradisional yang ada di masyarakat; (2) Menumbuhkan lembaga pemberdayaan sosial baru melalui inisiatif lokal; (3) Anggotanya adalah fakir miskin yang memiliki kemauan berusaha; (4) Bertempat tinggal di area yang berdekatan; (5) Kepala Keluarga berusia produktif 18-58 tahun; (6) Pendamping sebagai agen perubahan (*agent of change*). Untuk memfasilitasi KUBE dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif diperlukan tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan memiliki komitmen terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Pemberian Usaha Ekonomi Produktif kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Dalam penelitian Apriyadi dkk (2013) berhasil mengidentifikasi tiga alternatif strategi, yaitu perbaikan tata kelola program, pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin berbasis masyarakat, dan peningkatan kinerja KUBE fakir miskin, dengan 9 aspek pertimbangan dan 19 langkah strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif seperti meningkatkan intensitas pendampingan, memfasilitasi pendidikan non formal/pelatihan keterampilan, serta pembenahan dalam seleksi penerima program adalah langkah strategis yang paling diprioritaskan.

Selanjutnya Baharuddin (2018) hasil penelitiannya menemukan bahwa implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE Pertanian Kelurahan Gubuksuma Kecamatan Tidore Utara belum memperoleh hasil signifikan baik dari jumlah maupun mutu pelayanan, baik dari sisi strategi pengembangan program dan supervisor/pendamping sosial.

Kemudian Diana Sari dkk (2020) juga menemukan salah satu strategi Dinas Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui pengelolaan usaha pada unit KUBE. Pengimplementasian program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Gunung Jaya dapat dilihat dari sisi penerapan tujuan dan sasaran, pelatihan dan pendampingan, pembiayaan serta pengelolaan usaha dimana dalam pelaksanaannya Implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Desa Gunung Jaya kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa indikator implementasi program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti pendampingan, pembiayaan, sedangkan dalam hal tujuan dan sasaran serta pengelolaan usaha sudah berjalan efektif .

Dari Penelitian Apriyadi dkk (2013), Baharuddin (2018) dan Diana Sari dkk (2020) menemukan bahwa implementasi program KUBE diberbagai daerah masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya program yang tidak berjalan dengan semestinya, seperti pendampingan, pembiayaan. Adapun alternatif yang dapat dilakukan untuk peningkatan usaha KUBE seperti meningkatkan intensitas pendampingan, memfasilitasi pendidikan non formal/pelatihan keterampilan, serta pembenahan dalam seleksi penerima program.

Berfokus pada penelitian yaitu di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bengkalis Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis, pendapatan per kapita penduduk cenderung mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan (2010). Penurunan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkalis ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan nilai *output* total Kabupaten Bengkalis dan penambahan jumlah penduduk. Penurunan nilai *output* total menggambarkan kinerja perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum. Beberapa penyebab utamanya ditengarai adalah melemahnya produksi minyak Bengkalis dan harga minyak dunia yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir berimbas pada menurunnya pendapatan daerah, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa secara umum. Penyebab utama lainnya disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat sementara pertumbuhan PDRB cenderung menurun di Kabupaten Bengkalis.



Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Jumlah Garis Miskin
1.	2016	455.021
2.	2017	496.657
3.	2018	508.633
4.	2019	533.123
5.	2020	581.416

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tahun 2016 jumlah kemiskinan sebanyak 455.021, pada tahun 2017 jumlah kemiskinan sebanyak 496.657, tahun 2018 jumlah kemiskinan sebanyak 508.633 pada tahun 2019 533.123 dan pada tahun 2020 jumlah kemiskinan sebanyak 581.416. Hal ini menunjukkan bahwasanya terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berupaya mensukseskan program dari pusat khususnya dari Kementerian Sosial yang merupakan salah satu Kementerian yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah membuat Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan mendekatkan mereka dari akses permodalan usaha. Selanjutnya dapat dilihat dari data kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berupa Rekapitulasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Anggota Rumah Tangga	Kepala Rumah Tangga
1	Mandau	25.160	6.215
2	Bathin Solapan	13.786	3.408
3	Pinggir	11.887	2.927
4	Talang Muandau	4.691	1.277
5	Bandar Laksamana	4.086	1.065
6	Bukitbatu	7.877	2.132
7	Siak Kecil	7.218	2.013
8	Rupat	17.588	4.561
9	Rupat Utara	6.533	1.521
10	Bengkalis	26.745	6.572
11	Bantan	17.530	4.654

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Bengkalis merupakan wilayah yang mayoritas terdapat masyarakat miskin, dimana anggota rumah tangga masyarakat miskin berjumlah 26.745 Jiwa dengan kepala rumah tangga berjumlah 6.572 KK yang ada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang di buat oleh pemerintah yaitu: Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, Program keluarga Harapan (PKH), Program askeskin/Jamkesmas, Program bantuan langsung Tunai (BLT), dan Program Kelompok usaha bersama (KUBE).

Adapun fokus lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu KUBE yang terdapat di Kecamatan Bengkalis. Dimana berdasarkan rekapitulasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dan rekapitulasi nama-nama KUBE di Kabupaten Bengkalis terlihat jelas jumlah tertinggi anggota rumah tangga miskin dan jumlah KUBE yang terbanyak terdapat di Kecamatan Bengkalis dibandingkan dengan 10



(sepuluh) Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana program mengalami kendala dengan terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KUBE seperti melakukan pembekalan dan bimbingan kepada anggota KUBE sebagai penerima bantuan, pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendamping maupun anggaran untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dari observasi yang dilakukan di Kecamatan Bengkalis, dalam pelaksanaannya masih terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah terhenti dan tidak berjalan lagi seperti KUBE yang terdapat di Kecamatan Bengkalis yaitu Kube Bunga Ros I, Kube Bunga Ros II, Kube Mandiri Teluk Latak, Kube Usaha Sejati, Kube Mandiri Sebauk, Kube Tanah Betuah, Kube Camar Laut, Kube Raja Udang, Kube Nelayan Sejati, Kube Madani, Kube Samudera Jaya, Kube Putri Ayu, Kube Tunas Karya, Kube Jaya, dan Kube Tani Makmur. Permasalahan yang terjadi saat ini dari hasil observasi peneliti antara lain: 1. belum terbangunnya jaringan lintas sektoral untuk pendampingan pemberdayaan KUBE pasca pembentukan; 2. belum optimalnya pembentukan KUBE dengan sasaran keluarga miskin; 3. belum adanya pembiayaan berkelanjutan bagi peningkatan usaha KUBE; 4. rendahnya tingkat pendidikan anggota KUBE membuat anggota KUBE kesulitan melaksanakan program KUBE ini dalam hal ini perlunya wawasan dari anggota KUBE berupa sosialisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis**".

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini khususnya berlangsung di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Berkaitan dengan pemilihan informan, teknik yang digunakan salah satunya adalah prosedur purposif. Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum didalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2011). Untuk Pemilihan sampel peneliti lebih merinci lagi penelitian yang dilakukan pada KUBE yang terdapat di Kecamatan Bengkalis, yaitu dengan melakukan pembatasan kasus dengan kriteria KUBE aktif dengan tahun berdiri lebih dari 5 (lima) tahun, kategori KUBE mandiri yang bagus yang benar-benar dapat memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan sasaran penelitian yaitu pejabat dan staf di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis khususnya Di Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Koordinator KUBE Pendamping KUBE dan anggota KUBE di Kecamatan Bengkalis, adapun sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Milles dan Hubberman. Analisis ini menggunakan logika deduktif verifikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui KUBE

Adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan benar dan berhasil menurut model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle amat ditentukan oleh tingkat *imlementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Implementation* dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 berdasarkan Pasal-pasalnya, yang terdiri dari:

1. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi

Dinas sosial rutin melaksanakan koordinasi bersama pengurus program KUBE lainnya seperti pendamping KUBE hingga anggota KUBE sekalipun, sesuai Peraturan Menteri Sosial No 2 Tahun 2019 tentang bantuan usaha ekonomi produktif kepada KUBE adalah salah satu bentuk penanganan fakir miskin untuk meningkatkan



pendapatan mereka, koordinasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas sosial Kabupaten Bengkalis.

Hal yang paling penting dalam koordinasi dalam KUBE ini adalah terkait dana dan anggaran hingga kesiapan anggota KUBE dalam berusaha hal ini dikarenakan mengingat anggaran dana KUBE yang datang dari pusat harus selalu diwaspadai agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran anggaran dana. Koordinasi harus selalu dilaksanakan dengan stakeholder terkait diantaranya adalah Dinas Perindag untuk usaha industri rumah tangga, Perikanan untuk Budidaya Ikan, Pertanian dan Perkebunan yang berkaitan di Bidang pertanian. Koordinasi bersama stakeholder ini dimaksudkan agar program KUBE ini lebih mudah terealisasi dan lebih maju lagi karena didukung oleh Stakeholder yang terkait pada program KUBE tersebut.

b. Tipe Keuntungan

kunci untuk mendapatkan keuntungan adalah orang yang selalu bekerja keras baik itu dipihak implemntasi kebijakan maupun anggota KUBE itu sendiri akan memperoleh hasil yang maksimal, disini informan lebih menekankan kepada pelatihan program KUBE agar masyarakat anggota KUBE bisa memahami dan mempelajari hasil dari pelatihan hingga menerapkannya agar menghasilkan keuntungan, di sisi lain informan juga sering melaksnakan pelatihan di setiap desa mengenai program KUBE agar pelatihan KUBE merata di setiap Desa Kecamatan.

Pelatihan tersebut adalah demi menignkatkan sumber daya manusia terdapat pendamping KUBE yang akan melakukan pelatihan kepada anggota KUBE baik itu secara teori maupun lapangan, aspek pelatihan ini dapat dilihat melalui aspek prosedur, pendekatan metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan peserta pelatihan tujuan pelatihan dan sasaran. Kemudian dari hasil observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwasanya Identifikasi kebutuhan peserta pelatihan menggunakan metode langsung atau tidak langsung bertujuan untuk memahami dan mengenal karekteristik peserta pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan dari aspek pengetahuan. Kemudian menurut informan keberadaan KUBE di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi sarana dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif khususnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi sosial.

c. Tingkat perubahan perilaku (*Extent of change Envision*)

Evaluasi perlu dilakukan agar target pencapaian dari keberhasilan program ini tidak tercapai, dan pentingnya mengetahui standar ukuran keberhasilan program KUBE. Secara umum keberhasilan KUBE tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat di sekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia baik itu pangan, sandang, dan papan, barulah peningkatan dinamika dan keterampilan. Apabila KUBE tidak terealisasi dengan baik atau tidak berjalan dengan efektif perlu dilakukan revitalisasi upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan berbasis keluarga melalui penilaian jenis usaha yang seusi dengan kebutuhan pasar dan potensi setempat. Kemudian dari pada itu perlunya pendamping KUBE yang efektif, inovatif, kolaboratif dan sinergitas untuk pembinaan secara teknis.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Dinas sosial pada bidang pemberdayaan sosial selalu mematuhi kebijakan yang dibuat pimpinan apa lagi yang berkaitan dengan anggaran dana, kemudian kebijakan yang diambil tergantung pada permasalahan yang ada. Kemudian dari hasi observasi penulis dilapangan dapat diuraikan bahwasanya Dinas sosial Kabupaten Bengkalis selalu mengevaluasi kerjanya apabila terdapat kesalah pahaman dalam pendataan dan dalam kebijakan hal ini terdapat pada Dinas sosial yang tidak pernah salah dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat anggota KUBE Kecamatan Bengkalis. Kemudian dari pada itu dari hasil observasi penulis temukan di lapangan ada sekitar

15 kelompok KUBE yang tidak aktif lagi akibat dari kurangnya pengawasan dari Dinas sosial terhadap KUBE yang tidak aktif tersebut ada pun KUBE yang tidak aktif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Daftar Nama Kelompok Kube yang Tidak Aktif di Kecamatan Bengkalis

No	Nama KUBE	Desa
1	KUBE Bunga Ros I	Pedekik
2	KUBE Bunga Ros II	Pedekik
3	KUBE Mandiri Teluk Latak	Teluk Latak
4	KUBE Usaha Sejati	Teluk Latak
5	KUBE Mandiri Sebauk	Sebauk
6	KUBE Tanah Betuah	Meskom
7	KUBE Camar Laut	Rimbis Sekampung
8	KUBE Raja Udang	Rimbis Sekampung
9	KUBE Nelayan Sejati	Rimbis Sekampung
10	KUBE Madani	Rimbis Sekampung
11	KUBE Samudara Jaya	Rimbis Sekampung
12	KUBE Puteri Ayu	Damon
13	KUBE Tunas Karya	Damon
14	KUBE Jaya	Kuala Alam
15	KUBE Tani Makmur	Senggoro

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2021

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan ada 15 kelompok KUBE yang tidak aktif lagi di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat bahwa 15 kelompok KUBE yang tidak aktif dengan desa yang berbeda beda, dan ada juga Desa yang sama. Hal ini bahwasanya pentingnya pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap kelompok KUBE yang tidak aktif hal ini dikarenakan kelompok yang sudah menerima bantuan dana BANSOS untuk program KUBE harus efektif dilakukan tanpa adanya pemberhentian dalam program KUBE ini, hal ini dilakukan agar program KUBE yang sudah terealisasi di Kabupaten Bengkalis tetap efektif dilaksanakan.

e. Pelaksanaan program (*program implementor*)

Dari wawancara dapat penulis simpulkan bahwasanya kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial terkait masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan bantuan KUBE adalah dengan mengevaluasi kembali dan pendataan kembali dan akan direalisasikan apabila anggaran dana sudah ada pada mereka. Implementasi kebijakan penanganan fakir miskin dilakukan dengan menganalisa implementasi panduan pada pelaksana KUBE tahun 2010 mengevaluasi dampak dan mengacu pada kriteria dan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

f. Sumber daya (*Resources Committed*)

Dinas sosial memberi pemahaman untuk pendamping KUBE sangat terdepan dalam membimbing anggota KUBE agar mereka tetap efisien menjalankan usahanya, pelatihan yang efektif ada pada pendamping KUBE baik berupa seminar maupun pembelajaran di lapangan dan pihak Dinas sosial mengkoordinasi dan memfasilitasi pelatihan tersebut. Mengenai pendamping KUBE wawasan yang didapatkan sangat lengkap dari pelatihan tersebut mulai dari sistem lapangan hingga memahami dasar hukum program KUBE, Koordinator Pendamping KUBE Kabupaten Bengkalis seperti Ikke Rahmawati sering melakukan pengawasan dan mendampingi anggota KUBE yang merupakan bagian dari pengawasannya. Menurut Ikke Rahmawati program KUBE ini kami bimbing pada anggota agar anggota lebih mempunyai kemampuan dan teknik menjual hasil pertaniannya. Kendala utama yang

dihadapi seperti usaha bertani adalah harga jatuh disaat panen raya dan buah nanas merupakan salah satu hasil pertanian yang unggul di Desa tempat Ikke dampingi anggota KUBE nya.

2. Lingkungan implementasi (*Context of Implementation*)

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat

Dinas sosial dan pejabat didalamnya mengenai program KUBE ini selalu memperhatikan dampak dan untuk kedepannya dalam membuat suatu kebijakan, karena dalam membuat kebijakan diperlukannya sebuah strategi khusus agar program menjadi lebih efektif dilaksanakan, dari hasil observasi peneliti dilapangan penulis temukan bahwasanya Dinas Sosial bagus melakukan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada demi meminimalisir satu kesalahan yang akan terjadi dalam program KUBE ini dan selalu memperhatikan dampak negatif yang akan timbul dari kebijakan yang akan dibuat.

b. Karakteristik Institusi dan Regim yang Berkuasa

Dinas sosial melalui bidang penanganan fakir miskin dalam karekteristik kebijakan selalu mengedepankan dasar hukum sebagai patokan karekteristik kebijakan dan melihat suatu permasalahan baru timbulnya ide dan pertimbangan dalam membuat kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan (*compliance*) dan daya tanggap (*responsiveness*)

Anggota KUBE salalu patuh terhadap aturan yang menjadi dasar dari progam KUBE ini dikarenakan untuk mencapai hasil yang maksimal aturan harus ditaati agar mereka menjalankan usaha dengan mendapatkan modal yang diberikan oleh pemerintah, karena guna melancarkan sebuah kebijakan perlunya aturan yang membuat orang mematuhi ini lah kunci dari keberhasilan dari suatu kebijakan. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, ditemukan suatu kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada anggota KUBE yang ingin memahami sedalam-dalamnya kunci sukses bagaimana menjalankan sebuah usaha KUBE ini, pihak anggota hanya memahami dari penjelasan pendamping saja dan pentingnya sosialisasi kunci keberhasilan program KUBE ini agar anggota KUBE memahami aturan dan dasar dari program ini mengingat anggota KUBE di Kecamatan Bengkalis banyak dari tamatan SD membuat program ini akan sulit mencapai kesuksesan apabila tidak dilaksanakan sosialisasi rutin dari pihak Dinas sosial kabupaten Bengkalis.

Faktor Penghambat Implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis

a. Belum Terbangunnya Jaringan Lintas Sektoral Untuk Pendampingan Pemberdayaan KUBE Pasca Pembentukan.

Dinas sosial sering malakukan koordinasi bersama instansi terakait dikarenakan Koordinas merupakan hal yang penting dalam sebuah program melalui arahan rapat dengan Kepala Dinas sosial menekankan bahwasanya koordinasi dilaksanakan bersama-sama dalam waktu yang secepatnya disinilah nanti melakukan pengawasan dan kontrol kepada anggota KUBE yang sedang berjalan usahanya, akan tetapi dari hasil observasi penulis dilapangan terdapat kurang sinkronisasinya antara pihak Dinas sosial dengan instansi terkait.

b. Belum adanya pembiayaan berkelanjutan bagi peningkatan program KUBE

Tidak adanya pembiayaan berkelanjutan dalam hal ini bantuan dari pusat untuk program KUBE di Kecamatan Bengkalis dari hasil wawancara bersama Siti Tiara selaku pendamping KUBE Rimbas sekampung pembiayaan hanya diberi pada awal pelaksanaan program KUBE, penting nya pembiayaan berkelanjutan agar program ini berjalan dengan baik karena pada dasarnya program ini harus memliki bantuan yang cukup karena berkaitan dengan usaha yang terus menerus harus diberi kecukupan menegani fasilitas hingga barang dan jasa.

c. Rendahnya tingkat pendidikan anggota KUBE

Pendidikan adalah pembelajaran dan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi untuk mendapatkan suatu pencapaian. Secara umum pendidikan sebagai usaha besar sadar dan terencana untuk



mewujudkan suatu pencapaian. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik.

Maksud dari pendidikan merupakan faktor penghambat dari program KUBE yaitu anggota KUBE itu sendiri dikarenakan kebanyakan yang merupakan anggota KUBE adalah tamatan SD tentu hal ini membuat kurangnya daya wawasan anggota KUBE akan menciptakan usaha yang membutuhkan keahlian dalam usahanya. Memang pada dasarnya pendidikan bukan lah patokan dalam berusaha akan tetapi mengingat zaman sekarang ini sudah berteknologi canggih tentu hal ini dibutuhkan skil pemahaman yang tinggi dalam membangkitkan usaha.

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

a. Sosialisasi

Bahwasanya Dinas sosial rutin melaksanakan sosialisasi tentang program KUBE, akan tetapi yang penulis temukan dari hasil observasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan di setiap desa –desa hal ini mengakibatkan kurangnya penyebaran sosialisasi tentang program KUBE ini di Kecamatan Bengkalis, masyarakat Desa senggoro diatas bahwasanya, Dinas Sosial kabupaten Bengkalis kurang mensosialisasi di desa-desa hanya berfokus di kelurahan dan desa yang berada di dekat kota, hal ini membuat kurang tersebarnya sosialisasi akan program KUBE ini, kemudian dari pada itu sosialisasi yang dilaksanakan harusnya lebih ke desa terpencil, mengingat desa terpencil lah yang sebenarnya yang harus kita perhatikan karena desa terpencil memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

b. Faktor Disposisi

Dari hasil observasi dan wawancara dapat diuraikan bahwasanya infroman sangat mematuhi perintah atasan apabila terdapat masalah dalam program KUBE ini dan infroman melapor permasalahan dan menunggu kebijakan putusan yang dibuat oleh atasan untuk diimplementasikan. Disposisi merupakan intruksi singkat tentang tindak lanjut penyelesaian suatu permasalahan dibuat oleh pimpinan untuk staf bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau otoritasnya. Tujuan membuat disposisi adalah bawahan dapat menindaklanjuti atau menyelesaikan rapat atau surat masuk seperti yang diminta pimpinan, tindak lanjut ini bisa berupa kebijakan atasan, surat masuk untuk menyelesaikan masalah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi program KUBE yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada kelompok usaha bersama. secara implementatif program ini bersama wilayah Kecamatan lainnya di Kabupaten Bengkalis terutama mengenai penyaluran dana sudah tepat sasaran atau diberikan kepada fakir miskin yang tergolong dalam kelompok usaha bersama, kemudian dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dinas sosial selaku kordinator program KUBE ini sudah maksimal mengkoordinirkan program ini agar berjalan dengan baik, akan tetapi kekurangannya ada pada sosialisasi program KUBE ini sehingga tidak merata program KUBE ini diketahui oleh masyarakat miskin terutama di desa terpencil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan tulisan ini sehingga dapat dimanfaatkan dikemudian hari demi mengembangkan ilmu pengetahuan maupun mencari solusi dari permasalahan yang sekiranya dengan okus maupun lokus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo, 2020, *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta.
Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Adhitya Andrebina Agung.
Heriyanto, Meyzi, Adianto dan Hasim As'ari. 2019. *Program CSR di Indonesia*. Taman Karya:



Pekanbaru.

Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Rusli, Zaili. 2014. *Pemeriksaan Masyarakat Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rusli, Zaili. 2017. *Tata Kelola Pembangunan Kawasan*. Pekanbaru: Alaf Riau

Soetomo. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edit. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI No 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.